

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2017 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam bentuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan *managerial* yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan penyusunan bahan LKPj Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016);
7. Peraturan Gubernur banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Derah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).

## B. GAMBARAN UMUM DAERAH PADA UNIT SKPD BIRO PEMERINTAHAN

### 1. Kedudukan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten menurut Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten pada pasal 2 ayat (1) menyatakan “Sekretariat Daerah Merupakan Unsur Staff”. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) juga pada Peraturan Gubernur tersebut menyatakan “Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif” yang pelaksanaannya dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Praja dalam melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, produk hukum dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugas tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Unit Organisasi Internal yang melaksanakan fungsi *staffing* untuk melaksanakan fungsi di bidang urusan pemerintahan dalam rangka membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten pada pasal 10 ayat (1) tugas pokok Biro Pemerintahan adalah membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang kerjasama pemerintahan, administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan umum, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah.

Kemudian di jelaskan pada ayat (2) dari pasal 10 Peraturan Gubernur tersebut rincian tugas pokok Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan di bidang pemerintahan, administrasi aparatur pemerintahan daerah dan otonomi daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Biro Pemerintahan berdasarkan rencana strategis 2017-2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Merencanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 6) Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 7) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 8) Mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

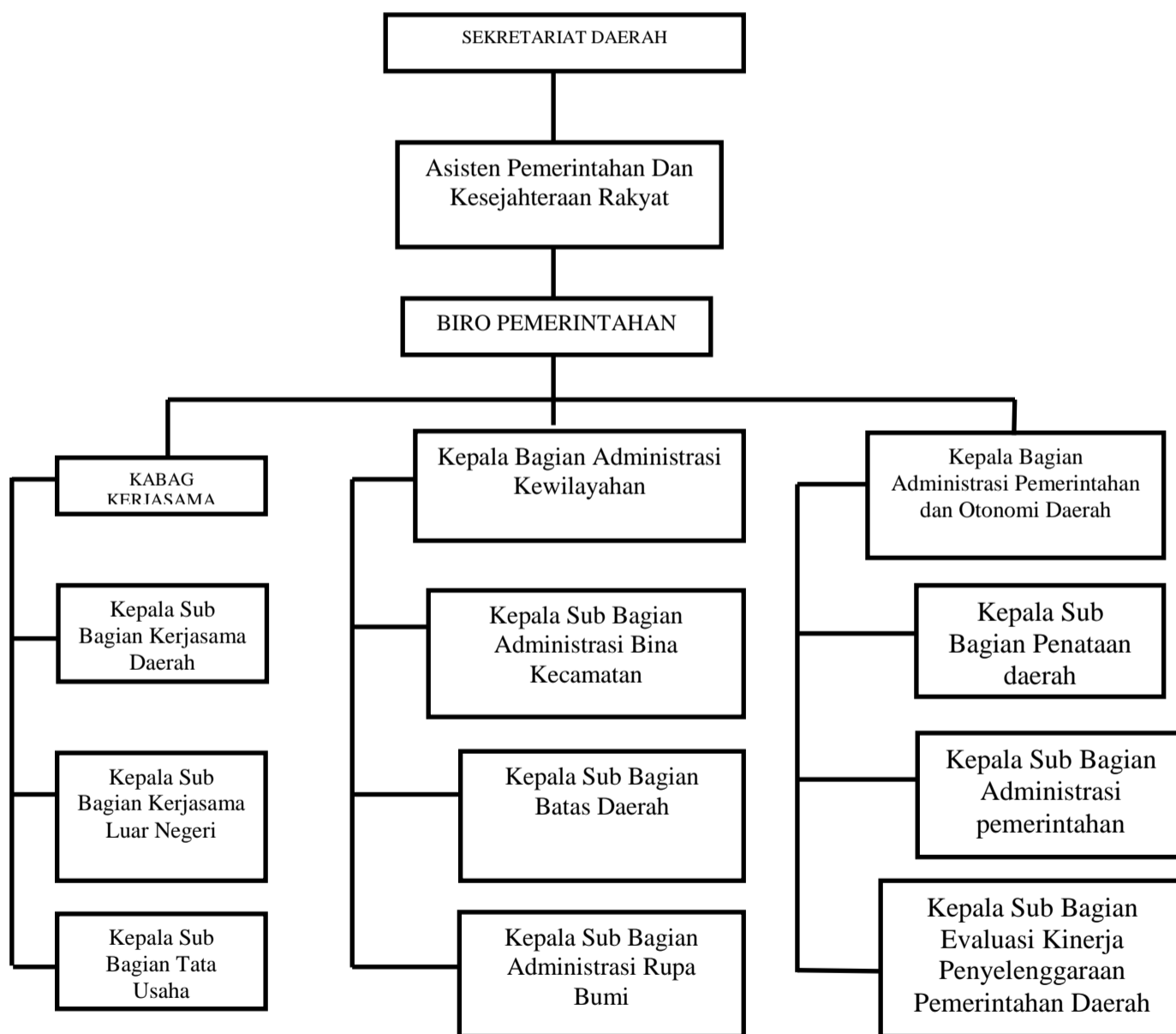
Dan Kepala Biro Pemerintahan membawahi :

- a. Bagian Kerjasama;
- b. Bagian Administrasi Kewilayahan
- c. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi  
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten



#### 4. Kondisi SDM Aparatur

Pada tahun 2017, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebanyak 47 orang dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan**

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Plt. Kepala Biro	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	2	2
3	Kepala Sub Bagian	-	-	7	3	10
4	Fungsional Umum/Staf	-	4	30	-	34
<b>JUMLAH</b>		-	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>47</b>
<b>% terhadap Jumlah Pegawai</b>		-	<b>8.51</b>	<b>76.60</b>	<b>14.89</b>	

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2017

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	
1	Plt. Kepala Biro	-	1	-		-	-	-	1
2	Kepala Bagian	1	2	-		-	-	-	3
3	Kepala Sub Bagian	-	5	1	2	-	-	-	7
4	Fungsional Umum/Staf	-	5	22	2	1	-	5	35
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>47</b>
<b>% terhadap Jumlah Pegawai</b>		<b>2.13</b>	<b>27.66</b>	<b>48.94</b>	<b>8.51</b>	<b>2.13</b>	<b>-</b>	<b>10.64</b>	

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2017

Jenis pelaksanaan Diklat Struktural dan Diklat Teknis yang telah diikuti pegawai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2016 sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2017**

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (orang)
(1)	(2)	(3)
<b>A</b>	<b>Diklat Struktural</b>	
1	Diklatpim III	3
2	Diklatpim IV	13
3	Adum	4

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (orang)
(1)	(2)	(3)
<b>B</b>	<b>Diklat Teknis</b>	
1	PDP3P	1
2	SPIP	1
3	Tata Laksana Pembangunan Daerah	1
4	Pembinaan Pengelola Kegiatan Anggaran Satuan Kerja	1
5	Bendahara	2
6	Teknis Bendaharawan Daerah	1
7	Pencatatan Dan Pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1
8	Pengadaan Barang dan Jasa	1
9	Diklat Kearsipan	1
10	Pengurus Barang Daerah	1
11	Penyusunan Bahan Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan	1
12	Manajemn Data Pemerintahan Berbasis Spasial (GIS)	2
13	Diklat Tata Naskah Dinas	1
14	Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	1

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2017

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

### BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

#### A. VISI DAN MISI

Visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju di masa mendatang. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten merupakan Satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki otoritas di bidang pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah periode tahun 2012-2014 melalui Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada peningkatan pelayanan di bidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan serta Umum.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- **PENINGKATAN KUALITAS KINERJA**, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan.
- **TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipatif dan penegakan hukum.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut, maka perlu dirumuskan melalui upaya-upaya yang akan dilaksanakan melalui Misi yang secara komprehensif dan diekspresikan dalam bentuk pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2012-2017, Misi yang diusung meliputi :

- Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- Misi Kedua : Mewujudkan sekretariat daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang tata praja, ekonomi dan administrasi pembangunan serta umum
- Misi Ketiga : Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 3 (tiga) rumusan substansi Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang tata praja
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja kepada semua pemangku kepentingan

## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk “Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi” , dicapai melalui upaya :
  - a. membangun sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan, keahlian dan keilmuan ditempuh melalui kebijakan :
    - 1)meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
    - 2)meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya aparatur
  - b. membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel dan akuntabel ditempuh melalui kebijakan :
    - 1)meningkatkan kredibilitas aparatur
    - 2)meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
    - 3)menerapkan reward dan punishment secara adil dan bijaksana



2. Strategi untuk “Mewujudkan sekretariat daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang tata praja, ekonomi dan administrasi pembangunan serta umum”, dicapai melalui upaya :
  - a. menata struktur organisasi dan tata kerja sekretariat daerah yang mampu mengakomodir dan mengkoordinir semua pemangku kepentingan ditempuh melalui kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sekretariat daerah
  - b. memantapkan fungsi dan peran sekretariat daerah dalam perumusan kebijakan ditempuh melalui kebijakan :
    - 1)meningkatkan kapabilitas kelembagaan sekretariat daerah
    - 2)memperkuat kapasitas kelembagaan sekretariat daerah
3. Strategi untuk ” Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan”, dicapai melalui upaya :
  - a. membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan efisien ditempuh melalui kebijakan :
    - 1)membangun system birokrasi yang efektif dan efisien
    - 2)menyusun system perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi
  - b. memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan administrasi ditempuh melalui kebijakan menyusun peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan untuk periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2014 sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagaimana Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Indikator Kinerja yang ditempuh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2017**

MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	STRATEGI (4)	KEBIJAKAN (5)
Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan	meningkatkan pelayanan yang prima kepada pimpinan, aparatut dan pemangku kepentingan	meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;	membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan efisien	menyusun system perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi
		meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan	memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan administrasi	menyusun peraturan perundang-undangan
		mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		
Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi	meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional, kompeten dan akuntabel.	Meningkatnya pengawasan akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi	membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel dan akuntabel	meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur

### C. PRIORITAS DAERAH

Dengan memperhatikan tema RKPD Tahun 2017 dan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta isu strategis tahun 2016 maka dari 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan adalah Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan urusan wajib di bidang :

1. Perencanaan Pembangunan;
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
3. Statistik.

## BAB III

### KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

#### A. KEBIJAKAN KEUANGAN UNIT SKPD

Sejalan dengan prioritas pembangunan tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan adalah Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, maka prioritas anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.302.390.200,- atau 81.99% dari total anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

#### B. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Input (struktur), ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Input dalam kerangka perencanaan program kegiatan berorientasi kepada capaian realisasi belanja. Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan pada Biro Pemerintahan tahun 2017 meliputi :

##### A. Per Urusan Wajib

Input (struktur), ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Input dalam kerangka perencanaan program kegiatan berorientasi kepada capaian realisasi belanja. Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan pada Biro Pemerintahan tahun 2017 meliputi :

##### A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan Daerah dengan 2 Kegiatan yakni Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri mencapai kinerja sebesar Rp. 751.873.000,- atau 76.66% dari target yang telah ditetapkan;
2. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui pelaksanaan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur meliputi Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah, Penataan Daerah Otonom, Administrasi Pimpinan Daerah dan hubungan Antar Lembaga, Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro Pemerintahan dan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja sebesar Rp. 3.309.779.114,- atau 79.25% dari target yang telah ditetapkan

3. Urusan Wajib Statistik melalui pelaksanaan Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja sebesar Rp. 137.671.600 atau 79.22 % dari target yang telah ditetapkan

#### B. Per Program

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja sebesar Rp. 38.371.000 atau 59.10 % dari target yang telah ditetapkan
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur mencapai Kinerja sebesar Rp. 1.537.305.844 atau 74.70% dari target yang telah ditetapkan;
3. Program Kerjasama Pembangunan Daerah mencapai kinerja sebesar Rp. 751.873.000 atau 76.66 % dari target yang telah ditetapkan
4. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum mencapai kinerja sebesar Rp. 1.734.102.300 atau 84.46 % dari target yang telah ditetapkan;
5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah mencapai kinerja sebesar Rp. 137.671.600 atau 94.66 % dari target yang telah ditetapkan

Rincian realisasi kinerja output sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Rencana dan Realisasi Input Belanja

NO	JENIS BELANJA	RENCANA Rp.	REALISASI Rp.	%	SISA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)	(6)	(7) = (6/3)
1	Belanja Pegawai	399.240.000	317.250.000	79.46	81.990.000	20.54
2	Belanja Barang	4.903.150.200	3.882.073.744	79.18	1.021.076.456	20.82
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.302.390.200</b>	<b>4.199.323.744</b>	<b>79.32</b>	<b>1.103.066.456</b>	<b>20.68</b>

Tabel 3.2  
Rencana dan Realisasi Input Tolok Ukur

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		64.928.000	38.371.000	59.10
		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	7.296.000	4.720.000	64.69
		1 Penyusunan Laporan Keuangan dan SPIP	7.296.000	4.720.000	64.69
		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan	57.632.000	33.651.000	58.39
		1 Penyusunan Laporan Kinerja	1.592.000	1.236.000	77.64
		2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	18.123.000	6.022.000	33.23
		3 Penyusunan Bahan RENSTRA Tahun 2017-2021	37.225.000	26.225.000	70.45

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		4 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja	692.000	168.000	24.28
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</b>		<b>2.058.109.400</b>	<b>1.537.305.844</b>	<b>74.70</b>
		<b>Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro Pemerintahan</b>	<b>895.109.400</b>	<b>598.969.252</b>	<b>66.92</b>
		1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS)	225.052.000	215.400.800	95.71
		2 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	292.372.000	154.926.000	52.99
		3 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK)	77.475.600	60.878.600	78.58
		4 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	204.745.800	105.918.000	51.73
		5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet	63.332.000	30.045.852	47.44
		6 Promosi dan Publikasi	32.132.000	31.800.000	98.97
		<b>Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar daerah pada Biro Pemerintahan</b>	<b>1.163.000.000</b>	<b>938.336.592</b>	<b>80.68</b>
		1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	400.000.000	351.451.810	87.86
		2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	763.000.000	586.884782	76.92
<b>2</b>	<b>Kerjasama Pembangunan Daerah</b>		<b>980.777.000</b>	<b>751.873.000</b>	<b>76.66</b>
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>	<b>801.696.000</b>	<b>645.268.000</b>	<b>80.49</b>
		1 Rapat Kerja Daerah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama	580.042.000	515.272.000	88.83
		2 Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia	100.421.000	100.000.000	99.58
		3 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah	121.233.000	29.996.000	24.74
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri</b>	<b>179.081.000</b>	<b>106.605.000</b>	<b>59.53</b>
		1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	85.324.000	77.614.000	90.96
		2 Rapat Koordinasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	62.466.000	0	0
		3 Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	31.291.000	28.991.000	92.65
<b>4</b>	<b>Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum</b>		<b>2.053.139.200</b>	<b>1.734.102.300</b>	<b>84.46</b>
		<b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>531.941.400</b>	<b>469.125.800</b>	<b>88.19</b>
		1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	37.248.000	34.526.000	92.69
		2 Penyusunan LPPD Provinsi Banten	101.984.000	96.964.000	95.08
		3 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten	73.418.000	69.078.000	94.09
		4 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) LPPD Kab/Kota	30.940.200	24.229.200	78.31

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		5 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) LPPD Provinsi Banten	187.776.000	150.820.000	80.32
		6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	100.575.200	93.508.600	92.97
		<b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b>	<b>251.960.000</b>	<b>233.205.000</b>	<b>92.56</b>
		1 Rapat Koordinasi Batas Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten	38.115.000	38.115.000	100
		4 Rapat Koordinasi Batas Daerah Antara Provinsi Banten Dengan Provinsi DKI Jakarta	56.135.000	52.380.000	93.31
		3 Inventarisasi Pilar Batas Provinsi Banten (Penyerahan Pilar dari BKSP)	62.370.000	47.370.000	75.95
		5 Inventarisasi Pilar Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	95.340.000	95.340.000	100
		<b>Penataan Daerah Otonom</b>	<b>296.509.000</b>	<b>259.744.000</b>	<b>87.60</b>
		1 Rapat Koordinasi Penyelesaian pelimpahan Aset Pemerintah antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota	110.311.200	92.911.200	84.23
		2 Rapat Koordinasi Penyelesaian pelimpahan Aset antara Kabupaten/Kota	88.137.600	79.734.400	90.47
		3 Rapat Koordinasi Penataan Daerah	98.060.200	87.098.400	88.82
		<b>Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga</b>	<b>291.968.800</b>	<b>216.920.000</b>	<b>74.30</b>
		1 Rapat Koordinasi Admiistrasi Kepala Daerah dan DPRD	97.210.000	89.760.000	92.34
		2 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW	1.280.000	1.280.000	100
		3 Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD	880.000	880.000	100
		4 Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah	880.000	880.000	100
		5 Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota	680.000	680.000	100
		6 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	93.270.000	53.880.000	57.77
		7 Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	97.380.000	69.560.000	71.43
		8 Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah	388.000	0	0
		<b>Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	<b>342.185.000</b>	<b>235.790.000</b>	<b>68.91</b>
		1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	110.565.000	100.255.000	90.68
		2 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	22.275.000	0	0
		3 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	110.060.000	72.570.000	65.94
		4 Rapat Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	99.285.000	62.965.000	63.42

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan</b>	<b>338.575.000</b>	<b>319.317.500</b>	<b>94.31</b>
		1 Pemetaan Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten	107.130.000	92.130.000	86.00
		2 Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	141.445.000	137.187.500	96.99
		3 Identifikasi dalam Rangka Validasi Temuan Pulau Baru di Provinsi Banten	90.000.000	90.000.000	100
4	<b>Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>	<b>Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan</b>	<b>145.436.600</b>	<b>137.671.600</b>	<b>94.66</b>
		1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	145.436.600	137.671.600	94.66

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### 1) PERMASALAHAN

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan yang mengganggu jalannya kinerja pada tahun 2017. Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2017, diantaranya :

1. Penyerapan anggaran baru dapat di laksanakan pada bulan Maret 2017;
2. Terjadinya pergantian pimpinan (Kepala Biro Pemerintahan) di sebabkan telah berakhirnya masa tugas Kepala Biro Pemerintahan pada akhir bulan Mei 2017. Pengangkatan Plt (Pelaksana Teknis) Kepala Biro Pemerintahan baru di lantik per 1 September 2017. Secara umum Biro Pemerintahan hanya dapat melaksanakan Program dan Kegiatan serta penyerapan anggarannya selama 7 Bulan; Kedua hal tersebut yang mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di buat sebelumnya.

#### 2) SOLUSI

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan;

4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);
5. Terkait dengan pensiun ASN seharusnya sudah dapat di prediksi jauh hari sebelumnya, dengan melihat data masa kerja dalam identitas ASN. Kemudian terkait dengan pengangkatan Plt (pelaksana teknis) seharusnya juga sudah dapat di verifikasi jauh hari sebelum pensiun seorang ASN. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan kembali, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai.



## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN**

##### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 2 Urusan Wajib yang meliputi : (1) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, (2) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dan (3) Urusan Wajib Statistik.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2017 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel.

maka, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada APBD-P Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 3 Urusan Wajib yang dilaksanakan melalui 5 program, 13 kegiatan, 46 keluaran dengan anggaran sebesar Rp. 5.302.390.200,- yang dilaksanakan oleh 13 Satuan Unit Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :

1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan;
2. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
3. Urusan Wajib Statistik.

Seiring dengan kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 serta berpedoman kepada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 6);
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 62); dan
3. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/068-SK.PPKD/X/2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

Urusan wajib yang dilaksanakan antara lain :

**Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui :**

- |   |                                 |   |  |
|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Program<br>Kegiatan<br>Keluaran | : | Kerjasama Pembangunan Daerah<br>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah<br>1. Rapat Kerja Gabungan Forum Mitra Praja Utama (MPU), dengan target 1 dokumen;<br>2. Rapat Koordinasi Pembinaan Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur, dengan target 4 dokumen;<br>3. Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dengan target 2 dokumen;<br>4. Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dengan target 6 dokumen. |
|   | Hasil yang diharapkan           | : | Meningkatnya jumlah dokumen kerjasama daerah sebesar 100% tahun 2017.  |
|   | Anggaran                        | : | Rp. 801.696.000,-  |
| 2 | Program<br>Kegiatan<br>Keluaran | : | Kerjasama Pembangunan Daerah<br>Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri<br>1. Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri, dengan target 4 Dokumen;<br>2. Rapat Koordinasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga, dengan target 4 Dokumen;<br>3. Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri, dengan target 2 dokumen.   |
|   | Hasil yang diharapkan           | : | Meningkatnya jumlah dokumen kerjasama luar negeri sebesar 100% tahun 2017.   |
|   | Anggaran                        | : | Rp. 179.081.000,-  |

**Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan melalui :**

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | Program<br>Kegiatan<br>Keluaran<br>Hasil yang diharapkan<br>Anggaran | : | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah<br>Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Pada Biro Pemerintahan<br>Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP, dengan target 11 dokumen.<br>Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Keuangan sebesar 100% Tahun 2107<br>Rp. 7.296.000,- |
|---|--|---|--|

2	Program	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
	Kegiatan	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan
	Keluaran	1. Penyusunan Laporan Kinerja, dengan target 3 dokumen; 2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan, dengan target 6 dokumen; 3. Penyusunan RENSTRA dengan target 1 dokumen; 4. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja, dengan target 1 dokumen.
	Hasil yang diharapkan	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebesar 100% Tahun 2107
	Anggaran	Rp. 57.632.000,-
3	Program	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
	Kegiatan	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
	Keluaran	1. Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS), dengan target 12 bulan; 2. Penyediaan Makan dan Minum Kantor, dengan target 12 Bulan; 3. Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK), dengan target 12 Bulan; 4. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan, dengan target 12 bulan; 5. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet, dengan target 12 Bulan; 6. Promosi dan Publikasi, dengan terget 12 bulan.
	Hasil yang diharapkan	Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran sebesar 100% Tahun 2107
	Anggaran	Rp. 895.109.400,-
4	Program	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
	Kegiatan	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Biro Pemerintahan
	Keluaran	1. Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah, dengan target 12 bulan; 2. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan target 12 bulan.
	Hasil yang diharapkan	Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pada Biro Pemerintahan sebesar 100% Tahun 2107
	Anggaran	Rp. 1.163.000.000,-

5	<p>Program</p> <p>Kegiatan</p> <p>Keluaran</p>	<p>Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum</p> <p>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan terget 1 dokumen;</li> <li>2. Penyusunan LPPD Provinsi banten, dengan target 1 dokumen;</li> <li>3. Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten dengan target 1 dokumen;</li> <li>4. Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) LPPD Kab/Kota, dengan target 8 dokumen;</li> <li>5. Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) LPPD Provinsi Banten dengan target 1 dokumen;</li> <li>6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen</li> </ol>
	<p>Hasil yang diharapkan</p>	<p>Meningkatnya Jumlah SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Evaluasi Kinerja sebesar 100% Tahun 2017</p>
	<p>Anggaran</p>	<p>Rp. 531.941.400,-</p>
6	<p>Program</p> <p>Kegiatan</p> <p>Keluaran</p>	<p>Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum</p> <p>Penataan Daerah Otonom</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota dengan target 2 dokumen;</li> <li>2. Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset antara Kabupaten/Kota dengan target 2 dokumen;</li> <li>3. Rapat Koordinasi Penataan Daerah dengan target 2 dokumen.</li> </ol>
	<p>Hasil yang diharapkan</p>	<p>Meningkatnya Jumlah Daerah Ototonom yang Terbina sebesar 100% Tahun 2017</p>
	<p>Anggaran</p>	<p>Rp. 296.509.000,-</p>

7	Program	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum
	Kegiatan	Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga
	Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan target 1 dokumen;</li> <li>2. Pemberhentian Anggota DPRD dan PAW dengan target 1 dokumen;</li> <li>3. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD dengan target 1 dokumen;</li> <li>4. Pemberian Ijin Cuti bagi pejabat negara/daerah dan DPRD target 1 dokumen;</li> <li>5. Penyusunan Konsep Sambutan hari jadi Kab/Kota dengan target 1 dokumen;</li> <li>6. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dengan target 2 dokumen;</li> <li>7. Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan target 3 dokumen</li> <li>8. Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah dan DPRD dengan target 1 dokumen;</li> </ol>
	Hasil yang diharapkan	Meningkatnya jumlah fasilitasi administrasi pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebesar 100% Tahun 2017
	Anggaran	Rp. 291.968.800,-
8	Program	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum
	Kegiatan	Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah
	Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi batas Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, dengan target 1 dokumen;</li> <li>2. Rapat Koordinasi batas Daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, dengan target 1 dokumen;</li> <li>3. Inventarisasi Pilar Batas Provinsi Banten (Penyerahan Pilar Batas dari BKSP), dengan target 1 dokumen;</li> <li>4. Inventarisasi Pilar Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dengan target 1 dokumen.</li> </ol>
	Hasil yang diharapkan	Meningkatnya Jumlah Daerah yang Difasilitasi Dalam Penataan Administrasi Wilayah dan Penegasan Batas Daerah sebesar 100% Tahun 2017
	Anggaran	Rp. 251.960.000,-

9	Program	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum
	Kegiatan	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
	Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dengan target 1 dokumen;</li> <li>2. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dengan target 1 dokumen;</li> <li>3. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, dengan target 1 dokumen;</li> <li>4. Rapat Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dengan target 1 dokumen.</li> </ol>
	Hasil yang diharapkan	Meningkatnya Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebesar 100% Tahun 2017
	Anggaran	Rp. 342.185.000,-
10	Program	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum
	Kegiatan	Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
	Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten, dengan target 2 dokumen;</li> <li>2. Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dengan target 1 dokumen;</li> <li>3. Identifikasi Dalam Rangka Validasi Temuan Pulau Baru di Provinsi banten, dengan target 1 dokumen;</li> </ol>
	Hasil yang diharapkan	Meningkatnya Jumlah Daerah yang Difasilitasi Dalam Pembinaan Administrasi Rupa Bumi sebesar 100% Tahun 2017
	Anggaran	Rp. 338.575.000,-

**Urusan Wajib Statistik dilaksanakan melalui :**

1	Program	:	Penyediaan Data Pembangunan Daerah
	Kegiatan	:	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Pemerintahan
	Keluaran	:	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dengan target 2 dokumen
	Hasil yang diharapkan	:	Meningkatnya Jumlah Data dan Informasi Bidang pemerintahan sebesar 100% tahun 2017
	Anggaran	:	Rp. 145.436.600,-

Rincian pelaksanaan program kegiatan yang diejawantahkan melalui pelaksanaan tolok ukur kegiatan sebagaimana Tabel 4.1

Tabel 4.1  
Perjanjian Kinerja  
Tahun 2017

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset</b>	<b>7.296.000,-</b>
			11 dokumen	1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP	7.296.000,-
		<b>Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>100%</b>	<b>Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan</b>	<b>57.632.000,-</b>
			3 Dokumen	1 Penyusunan Laporan Kinerja	1.592.000,-
			6 Dokumen	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	18.123.000,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	<b>Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</b>	<b>Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan</b>	1 Dokumen	3 Penyusunan Bahan RENSTRA tahun 2017-2021	37.225.000,-
			1 Dokumen	4 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja	692.000,-
			<b>100%</b>	<b>Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro Pemerintahan</b>	<b>895.109.400,-</b>
			12 bulan	1 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK)	225.052.000,-
			12 bulan	2 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS)	292.372.000,-
			12 bulan	3 Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	77.475.600,-
			12 bulan	4 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	204.745.800,-
			12 bulan	5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet	63.332.000,-
			12 bulan	6 Promosi dan Publikasi	32.132.000,-
				<b>100%</b>	<b>Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah pada Biro Pemerintahan</b>
	<b>Kerjasama Pembangunan Daerah</b>	<b>Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah</b>	12 bulan	1 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	400.000.000,-
			12 Bulan	2 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	763.000.000,-
			<b>100%</b>	<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>	<b>801.696.000,-</b>
		<b>Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah</b>	1 Dokumen	1 Rapat Kerja Daerah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama	580.042.000,-



NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
			1 dokumen	2 Rapat Kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia	100.421.000,-
			4 dokumen	3 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah	121.233.000,-
		<b>Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri</b>	<b>100%</b>	<b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar negeri</b>	<b>179.081.000,-</b>
			4 kali	1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	85.324.000,-
			4 kali	2 Rapat Koordinasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	62.466.000,-
			2 kali	3 Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	31.291.000,-
	<b>Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum</b>				
		<b>Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi</b>	<b>338.575.000</b>
			2 Dokumen	1 Pemetaan Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten	107.130.000
			1 Dokumen	2 Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi pemerintahan	141.445.000
			1 Dokumen	3 Identifikasi Dalam Rangka Validasi Temuan Pulau Baru di Provinsi Banten	90.000.000
			<b>100%</b>	<b>Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	<b>342.185.000</b>
			1 Dokumen	1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	110.565.000

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
			1 Dokumen	2 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	22.275.000
			1 Dokumen	3 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	110.060.000
			1 Dokumen	4 Rapat Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	99.285.000
			<b>100%</b>	<b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b>	<b>251.960.000,-</b>
			1 Dokumen	1 Rapat Koordinasi Batas Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	38.115.000,-
			1 Dokumen	2 Rapat Koordinasi Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat	56.135.000,-
			1 Dokumen	3 Inventarisasi Pilar Batas Provinsi Banten (Penyerahan Pilar dari BKSP)	62.370.000,-
			1 Dokumen	4 Inventarisasi Pilar Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	95.340.000,-
			<b>100%</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>531.941.400,-</b>
			1 Dokumen	1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	37.248.000,-
			1 Dokumen	2 Penyusunan LPPD Provinsi Banten	101.984.000,-
			1 Dokumen	3 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten	73.418.000,-
			8 dokumen kab/kota	4 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) LPPD Kab/Kota	30.940.200,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
			1 Dokumen	5 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) LPPD Provinsi Banten	187.776.000,-
			1 Dokumen	6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten	100.575.200,-
			<b>100%</b>	<b>Penataan Daerah Otonom</b>	<b>296.509.000</b>
			2 Dokumen	1 Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota	110.311.200
			2 Dokumen	2 Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset antara Kabupaten/Kota	88.137.600
			2 Dokumen	3 Rapat Koordinasi Penataan Daerah	98.060.200
			<b>100%</b>	<b>Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga</b>	<b>291.968.800</b>
			3 Dokumen	1 Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	97.210.000
			1 Dokumen	2 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW	1.280.000
			1 Dokumen	3 Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD	880.000
			1 Dokumen	4 Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara dan Daerah	880.000
			1 Dokumen	5 Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota	680.000
			2 Dokumen	6 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	93.270.000
			3 Dokumen	7 Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	97.380.000
			1 Dokumen	8 Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah	388.800

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	100%  2 dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan  1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	145.436.600  145.436.600
<b>JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2017</b>					<b>5.302.390.200</b>

## B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

### 1. Rencana dan Realisasi Output

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Pengukuran kinerja output pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 92,86% atau melebihi target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :

#### A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan Daerah dengan 2 Kegiatan yakni Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri mencapai kinerja sebesar Rp. 751.873.000,- atau 76.66% dari target yang telah ditetapkan;
2. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui pelaksanaan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur meliputi Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah, Penataan Daerah Otonom, Administrasi Pimpinan Daerah dan hubungan Antar Lembaga, Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro Pemerintahan dan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja sebesar Rp. 3.309.779.114,- atau 79.25% dari target yang telah ditetapkan

3. Urusan Wajib Statistik melalui pelaksanaan Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja sebesar Rp. 137.671.600 atau 79.22 % dari target yang telah ditetapkan

#### B. Per Program

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja sebesar Rp. 38.371.000 atau 59.10 % dari target yang telah ditetapkan
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur mencapai Kinerja sebesar Rp. 1.537.305.844 atau 74.70% dari target yang telah ditetapkan;
3. Program Kerjasama Pembangunan Daerah mencapai kinerja sebesar Rp. 751.873.000 atau 76.66 % dari target yang telah ditetapkan
4. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum mencapai kinerja sebesar Rp. 1.734.102.300 atau 84.46 % dari target yang telah ditetapkan
5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah mencapai kinerja sebesar Rp. 137.671.600 atau 94.66 % dari target yang telah ditetapkan

Rincian realisasi kinerja output sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Rencana dan Realisasi Output

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
	<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>		<b>92.86</b>
		<b>Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset</b>	<b>100</b>	<b>Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset</b>	<b>85,71</b>
		1 Penyusunan Laporan Keuangan dan SPIP sebanyak 11 dokumen	100	Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran 2016 pada Biro Pemerintahan sebanyak 19 dokumen meliputi : a. Laporan bulanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• bulan Januari : target fisik 5.65% dan target keuangan 5.65% dengan realisasi fisik 1.22% dan realisasi keuangan 0.00%</li> <li>• bulan Februari : target fisik 18.48% dan target keuangan 18.48% dengan realisasi fisik 2.75% dan realisasi keuangan 0.00%;</li> </ul>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• bulan Maret : target fisik 33.37% dan target keuangan 33.37% dengan realisasi fisik 3.10% dan realisasi keuangan 6.39%;</li> <li>• Bulan April : target fisik 45.94% dan target keuangan 45.94% dengan realisasi fisik 13.57% dan realisasi keuangan 16.97%;</li> <li>• bulan Mei : target fisik 55.53% dan target keuangan 55.53% dengan realisasi fisik 25.18% dan realisasi keuangan 24.26%;</li> <li>• bulan Juni : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 31.92% dan realisasi keuangan 28.86%;</li> <li>• bulan Juli : target fisik 69.44% dan target keuangan 69.44% dengan realisasi fisik 31.92% dan realisasi keuangan 28.86%;</li> <li>• bulan Agustus : target fisik 75.18% dan target keuangan 75.18% dengan realisasi fisik 31.92% dan realisasi keuangan 43.65%;</li> <li>• bulan September : target fisik 85.14% dan target keuangan 85.18% dengan realisasi fisik 61.06% dan realisasi keuangan 53.49%;</li> <li>• bulan Oktober : target fisik 91.39% dan target keuangan 91.39% dengan realisasi fisik 63.24% dan realisasi keuangan 54.99%;</li> <li>• bulan November : target fisik 95.50% dan target keuangan 95.50% dengan realisasi fisik 64.56% dan realisasi keuangan 61.76%; dan</li> <li>• bulan Desember : target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 90.31% dan realisasi keuangan 79.20%</li> </ul> <p>b. Laporan triwulanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Triwulan I : target fisik 33.37% dan target keuangan 33.37% dengan realisasi fisik 3.10% dan realisasi keuangan 6.39%;</li> <li>• Triwulan II : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 31.92% dan realisasi keuangan 28.86%;</li> <li>• Triwulan III : target fisik 85.14% dan target keuangan 85.14 % dengan realisasi fisik 61.06% dan realisasi keuangan 53.49%; dan</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Triwulan IV : target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 90.31% dan realisasi keuangan 79.20%.</li> </ul> <p>c. Laporan semesteran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semester I : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 31.92% dan realisasi keuangan 28.86%; dan</li> <li>• Semester II: target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 90.31% dan realisasi keuangan 79.20%.</li> </ul> <p>d. Laporan akhir tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 90.31% dan realisasi keuangan 79.20%.</li> </ul>	
		<p><b>Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan</b></p> <p>1 Penyusunan Laporan Kinerja sebanyak 3 dokumen</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p><b>Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan</b></p> <p>Terlaksananya Laporan Kinerja sebanyak 3 Dokumen yang di laksanakan pada Bulan Januari s/d bulan Februari 2017. Dokumen laporan kinerja yang di laksanakan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Bahan LAKIP akhir tahun anggaran 2016 sebanyak 1 dokumen pada tanggal 6 Januari 2016, yang menggambarkan capaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil sebagai berikut :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja Input : 79.20 %</li> <li>b. Kinerja Output : 88.08 %</li> <li>c. Kinerja Outcome : 93.98%</li> <li>d. Kinerja Program : 93.98%</li> </ol> </li> <li>2. Dokumen bahan LKPj Biro Pemerintahan Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen pada tanggal 22 Februari 2017, yang menggambarkan capaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil sebagai berikut :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja Input : 79.20%</li> <li>b. Kinerja Output : 88.08%</li> <li>c. Kinerja Outcome : 93.98%</li> <li>d. Kinerja Program : 93.98%</li> </ol> </li> <li>3. Dokumen LPPD Biro Pemerintahan tahun 2016 sebanyak 1 dokumen, capaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil sebagai berikut :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja Input : 79.20%</li> <li>b. Kinerja Output : 88.08%</li> <li>c. Kinerja Outcome : 93.98%</li> <li>d. Kinerja Program : 93.98%</li> </ol> </li> </ol>	<p>100</p> <p>100</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan sebanyak 6 dokumen	100	Penyusunan perencanaan program dan kegiatan sebanyak 6 dokumen antara lain : 1. Penyusunan RKA, DRPK Tahun 2018 dilaksanakan pada Bulan Agustus 2017 dengan hasil 1 dokumen RKA 2018; 2. Penyusunan DPPA 2017 yang dilaksanakan pada Bulan September 2017 dengan hasil 1 dokumen DPPA 2017; 3. Penyusunan IKU, Perkin dan Rencana Kerja Perubahan 2017; 4. Penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan 2018; 5. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 2018;	100
		3 Penyusunan Bahan Renstra Tahun 2017 s/d 2021 sebanyak 1 dokumen	100	Penyusunan Bahan Renstra 2017 s/d 2021 Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen dilaksanakan melalui 3 tahapan penyusunan antara lain : 1. Penyusunan Rancangan Awal Bahan Renstra yang di laksanakan pada tanggal 4 Agustus 2017. Penyusunan Rancangan Awal Bahan Renstra juga di dukung melalui kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Bahan Renstra yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2017 di Ruang Rapat Biro Biro Pemerintahan Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu. Kegiatan manghadirkan narasumber ahli yang berasal dari STIM Primagraha, BAPPEDA Provinsi Banten dan Badan Statistik Provinsi Banten. Hasil kegiatan adalah Dokumen Rancangan Bahan Renstra Biro Pemerintahan 2017 s/d 2021. 2. Penyusunan Rancangan Bahan Renstra yang di laksanakan pada tanggal 13 September 2017. Penyusunan Rancangan Awal Bahan Renstra juga di dukung melalui kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Bahan Renstra yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2017 di Ruang Rapat Biro Biro Pemerintahan Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu. Kegiatan manghadirkan Narasumber ahli yang berasal dari FISIP Unsera dan BAPPEDA Provinsi Banten. Hasil kegiatan adalah Dokumen Rancangan Bahan Renstra Biro Pemerintahan 2017 s/d 2021. 3. Penyusunan Bahan Renstra yang di laksanakan pada tanggal 30 September 2017. Penyusunan Bahan Renstra juga di dukung melalui kegiatan Rapat Penyusunan Bahan Renstra yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 di Ruang Rapat Biro Biro	100



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		4 Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja sebanyak 1 dokumen	100	<p>Pemerintahan Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu. Kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber ahli yang berasal dari FISIP Unsera dan BPPEDA Provinsi Banten. Hasil kegiatan adalah Dokumen Bahan Renstra Biro Pemerintahan 2017 s/d 2021.</p> <p>Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja sebanyak 1 dokumen yang berisikan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>2. Pengendalian dan evaluasi rancana kerja pembangunan daerah;</li> <li>3. Evaluasi capaian kinerja Renstra Setda Provinsi Banten 2012 - 2017.</li> </ol>	100
	<b>Kerjasama Pembangunan Daerah</b>		<b>100</b>		<b>122.62</b>
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>	<b>91.67</b>
		1 Rapat Kerja Daerah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama sebanyak 1 dokumen	100	<p>terlaksananya rapat kerja daerah forum kerjasama daerah mitra praja utama sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 april 2017 di hotel allium tangerang. peserta yang menghadiri rapat kerja terdiri dari 10 provinsi peserta mpu, seperti pemerintah provinsi se-jawa, bali, lampung, nusa tenggara timur, nusa tenggara barat, dll.</p> <p>Peserta dibagi kedalam dua kelompok, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok kebijakan yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten pemerintahan/Otda Setda Provinsi anggota MPU;</li> <li>2. Kepala Bappeda Provinsi anggota MPU;</li> <li>3. Kepala Biro Pemerintahan/Otda/Kerjasama Setda Provinsi anggota FKD MPU;</li> <li>4. Kepala Bagian Kerjasama/Otda;</li> <li>5. Kasubbag yang menangani Kerjasama;</li> <li>6. Sekretariat Bersama FKD-MPU;</li> </ol> </li> <li>b. Kelompok Teknis yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Teknis <i>Tourism, Trade and Investment</i>, yang terdiri dari Dinas yang menangani Pariwisata, Kebudayaan, Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas yang menangani Penanaman Modal dan PTSP;</li> </ol> </li> </ol>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>2. Kelompok teknis ketahanan pangan, yang terdiri dari Dinas yang menangani Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan perikanan, Peternakan dan perkebunan, Perekonomian, pembinaan BUMD;</p> <p>3. Kelompok teknis sosial kemasyarakatan, yang terdiri dari Dinas yang menangani Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, Kependudukan dan Satpol PP.</p> <p>kesepakatan yang di peroleh dalam rapat kerja antara lain :</p> <p>a. KESEPAKATAN KELOMPOK KEBIJAKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU XVII Tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Oktober 2018 bertempat di Mataram – Prov. Nusa Tenggara Barat;</li> <li>2. Tema Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU XVII Tahun 2018 adalah Keberhasilan Pelaksanaan Pilkada Guna Pengembangan Potensial Ekonomi, Perdagangan dan Investasi di Provinsi Mitra Praja Uta, dengan Narasumber antara lain : Menteri Dalam Negeri RI, Kepala BKPM RI, Menteri Pertanian RI, dan Menteri Perdagangan RI;</li> <li>3. SKB Gubernur anggota FKD-MPU Nomor : 02/SK/MPU/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bersama MPU akan direvisi dan dibuatkan peraturan/keputusan baru yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan saat ini;</li> <li>4. Sumber pembiayaan/iuran untuk kegiatan operasional Sekretariat Bersama MPU disepakati dilakukan penyesuaian, besaran iuran provinsi anggota MPU disesuaikan dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kisaran / range Pendapatan Asli Daerah;</li> <li>b. Kemampuan masing-masing Provinsi anggota MPU; dan,</li> <li>c. Kebutuhan Sekretariat Bersama MPU.</li> </ol> </li> </ol>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>5. Kesepakatan pembangunan MPU TTI-Center Jakarta. Lembaga ini bersifat nirlaba (non profit) dan menjadi "Helpdesk 10 Provinsi MPU" untuk sektor Pariwisata, Perdagangan dan Investasi. Untuk lokasi direncanakan bertempat di ex. Waduk Melati (Graha Niaga Thamrin) Jakarta Pusat;</p> <p>6. Diterimanya laporan pertanggungjawaban keuangan Sekber MPU yang bersumber dari iuran Keanggotaan Provinsi MPU Tahun 2016 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;</p> <p>b. KESEPAKATAN KELOMPOK TEKNIS</p> <p>1. Program kegiatan kerjasama pembangunan Tahun 2018 yang disepakati adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Kelompok <i>tourism, Trade and Investment (TII)</i> menspakati 18 program kegiatan;</p> <p>b. Kelompok ketahanan pangan menspakati 5 program kegiatan;</p> <p>c. Kelompok sosial kemasyarakatan menspakati 25 program kegiatan.</p> <p>2. Daerah Provinsi anggota FKD-MPU meminta kepada Sekber MPU untuk segera menyampaikan hasil Rapat Gabungan kepada seluruh Gubernur anggota FKD-MPU, agar program kerjasama pembangunan tahun 2018 dapat dianggarkan di masing-masing daerah.</p>	
		2 Rapat Kerja Nasional Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebanyak 1 dokumen	100	<p>Dapat dihadapirinya undangan Rapat Kerja Nasional Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan di Hotel Aryaduta Palembang pada tanggal 25 - 27 Oktober 2017. Tema yang diangkat dalam Rapat Pra Rakernas APPSI tersebut adalah "Revitalisasi Sitem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah" dengan hasil antara lain :</p> <p>1. Rancangan penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia Nomor 044/APP/1/2015 tentang Kenaikan Iuran Anggota APPSI dengan rincian sebagai berikut :</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>a. Provinsi yang memiliki APBD dibawah 1 triliun yang semula Rp. 50.000.000,- /tahun menjadi Rp. 60.000.000,- /Tahun;</p> <p>b. Provinsi yang memiliki APBD 1 sampai 5 Triliun yang semula Rp. 75.000.000,-/tahun menjadi Rp. 90.000.000,- / tahun;</p> <p>c. Provinsi yang memiliki APBD 5 sampai dengan 10 triliun yang semula Rp. 100.000.000,-/tahun menjadi 120.000.000,-/tahun.</p> <p>d. Provinsi yang memiliki APBD 10 sampai dengan 15 triliun yang semula Rp. 125.000.000,-/tahun menjadi Rp. 150.000.000,-/tahun;</p> <p>e. Provinsi yang memiliki APBD di atas 15 triliun yang semula Rp. 150.000.000,-/tahun menjadi Rp. 200.000.000,-/tahun.</p> <p>2. Program kerja APPSI Tahun 2018 yang akan disepakati pada Rakernas tersebut yang terdiri dari 13 rencana program kerja APPSI tahun 2018 yang salah satunya dilaksanakan di Provinsi Banten dan menjadi beban tanggungjawab Provinsi Banten dalam Penganggarannya yaitu kegiatan "Penyelenggaraan Seminar tentang Penataan Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah";</p> <p>3. Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>4. Pemaparan terkait kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa barat selaku Tuan Rumah penyelenggaraan Rakernas APPSI tahun 2018. Di rencanakan akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d 23 Februari 2018 bertempat di The Trans Luxury Hotel.</p>	
		3 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah sebanyak 3 Dokumen	100	<p>Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah sebanyak 3 Dokumen yang di laksanakan pada tanggal 7 Desember 2017 bertempat di Ruang Rapat Biro Permeritahan Setda provinsi Banten Gd. SKPD terpadu Lt. 2 dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang yang terdiri dari OPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Hasil yang di peroleh antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman terkait prosedur kerjasama daerah dimana kerjasama antar daerah harus dituangkan dalam Nota Kesepahaman / Kesepakatan Bersama untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. Dalam melaksanakan kerjasama wajib, daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerjasama, sekretariat kerjasama ini dikategorikan menjadi sekretariat bersama dan badan kerjasama antar daerah.</li> <li>2. Selain kerjasama antar daerah, pemerintah juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, kerjasama pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerjasama investasi dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;</li> <li>3. Kerjasama dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, penyelesaian perselisihan dan sanksi bagi para pihak, jangka waktu kerjasama, penyelesaian perselisihan dan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan.</li> </ol> <p>Keseluruhan hasil rakor terutama kepada rencana penyusunan data base terkait MoU / Perjanjian Kerjasama yang di laksanakan di Provinsi Banten.</p>	
		<p><b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri</b></p> <p>1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri sebanyak 4 kali</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p><b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri</b></p> <p>Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri sebanyak 3 kali yang dilaksanakan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 , bertempat di ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lt. 2 dengan peserta berjumlah 60 orang yang berasal dari OPD dan 10 orang yang berasal dari Tim TKKSD. Pembahasan rapat koordinasi terkait dengan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Rangka Kerjasama. Hasil yang di dapatkan adalah :</li> </ol>	<p>50</p> <p>75</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>a. Sesuai Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa Daerah dapat bekerjasama dengan kementerian/ lembaga, kerjasama tersebut cukup dituangkan dalam kesepakatan bersama bukan perjanjian kerjasama karena Pemerintah Daerah adalah Sub Koordinasi dari Kementerian/Lembaga;</p> <p>2. Pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 bertempat di Ruang Rapat Biro pemerintahan setda Provinsi Banten, Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu dengan peserta Berjumlah 60 orang perwakilan OPD Provinsi Banten dan 10 Orang Tim TTKSD. Pembahasan dalam rapat terkait dengan Teknik Penyusunan LOI, MOU Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/ Lembaga di Luar Negeri dan Kebijakan Daerah terkait Kerjasama Luar Negeri. Hasil yang di dapatkan adalah :</p> <p>a. Pemahaman Tim Kerjasama khususnya dari Kab/Kota dalam penyusunan LOI dan MOU.</p> <p>3. Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd SKPD Terpadu Lt.2. Dengan peserta berjumlah 60 orang berasal dari OPD Kab/Kota Se Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan kerjasama luar negeri. Pembahasan terkait dengan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Rangka Kerjasama. Hasil yang diperoleh adalah :</p> <p>a. Pemahaman terkait Ijin keluar Negeri terkait Kerjasama Luar Negeri.</p> <p>4. Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 bertempat di Le Dian Hotel &amp; Cottage Serang Banten, dengan peserta berjumlah 60 Orang dengan hasil yang di dapatkan antara lain :</p> <p>a. Kementerian Luar Negeri dapat memfasilitasi Lembaga Asing yang profesional serta menjangring Network dengan Lembaga Asing yang capable dan trusty;</p> <p>b. Kementerian Dalam Negeri melakukan filterisasi dan realisasi One Gate Policy/Centre of Excellences sesuai kebutuhan pemerintah daerah;</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Rapat Koordinasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga sebanyak 4 kali	100	Tidak Dilaksanakan	0
		3 Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri sebanyak 2 kali	100	Terlaksananya Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri sebanyak 1 kali pada tanggal 22 November 2017 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan LT. 2, Gd. SKPD Terpadu dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang berasal dari OPD Provinsi Banten dan 10 Orang dari Tim TKKSD yang menangani Kerjasama Luar Negeri.	50
	<b>Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum</b>		<b>100</b>		<b>95.14</b>
		<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan</b>	<b>100</b>
		1 Pemetaan Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten	100	Pemetaan dilakukan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan dua pembahasan yang berbeda, antara lain : 1. Rupabumi Warisan Budaya yang di laksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 bertempat di Hotel Puri Kayana dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. hasil yang diperoleh terkait data jumlah pelestari 2. Warisan Budaya tak Benda di Provinsi Banten antara lain : a. Jumlah Sanggar Seni Tradisional di Provinsi Banten sampai dengan pendataan tahun 2016 berjumlah 1.447 Sanggar; b. Sanggar Seni Rupa sampai dengan pendataan tahun 2016 berjumlah 9 Sanggar; c. Sanggar Seni Modern sampai dengan pendataan tahun 2016 berjumlah 399 sanggar; d. Sanggar Seni Teater Rakyat sampai dengan pendataan tahun 2016 berjumlah 20 sanggar; e. Sanggar seni teater modern sampai dengan pendataan tahun 2016 berjumlah 7 sanggar	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>3. Warisan Budaya Benda sampai dengan pendataan tahun 2016 se Provinsi Banten, antara lain :</p> <p>a. Kawasan Cagar Budaya berjumlah 3 Kawasan;</p> <p>b. Situs Cagar Budaya berjumlah 28 titik;</p> <p>c. Struktur Cagar Budaya berjumlah 41 titik;</p> <p>d. Benda Cagar Budaya berjumlah 95 titik; dan,</p> <p>e. Bangunan Cagar Budaya berjumlah 73 titik.</p> <p>2. Koordinasi Identifikasi dan Inventarisasi Pulau di Provinsi Banten yang dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Maret 2017 di Hotel Puri Kayana Serang dengan peserta berjumlah 60 orang. Hasil yang di peroleh antara lain :</p> <p>a. Pada tahun 2017 ditetapkan untuk Provinsi Banten harus mengidentifikasi dan memvalidasi penemuan pulau baru sebanyak 2 titik yang terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang;</p> <p>b. Pelaksanaan validasi pulau direncanakan pada tanggal 22 dan 23 November 2017;</p> <p>c. Tim validasi yang terlibat berasal dari KKP dengan dibantu unemerator/ nelayan lokal;</p> <p>d. Indikasi jumlah pulau yang di validasi untuk Kab. Pandeglang berjumlah 16 titik dan Kab. Serang berjumlah 2 titik.</p>	
		2	100	<p>Terlaksananya Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 1 dokumen yang di laksanakan selama 2 (dua) hari pada hari Kamis s/d Jumat tanggal 18 s/d 19 Mei 2017 bertempat di Hotel Jayakarta Anyer Serang dengan jumlah peserta sebanyak 155 peserta yang berasal dari Bagian Pemerintahan dan Camat se – Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. hasil yang di peroleh antara lain :</p> <p>1. Melaksanakan update kode data se Provinsi Banten;</p> <p>2. Hasil Update di inventarisir dalam bentuk Buku Update Kode Data tahun 2017.</p>	100
		3	100	<p>Kegiatan yang di laksanakan adalah melakukan Identifikasi temuan Pulau baru di Provinsi Banten. Sasaran Pulau baru tersebut adalah 20 Pulau di Kabupaten Pandeglang dan 2 Pulau di Kabupaten Serang. Pelaksanaan dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap, antara lain :</p>	100



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		<p><b>Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b></p> <p>1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebanyak 1 dokumen</p> <p>2 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebanyak 1 dokumen</p> <p>3 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 1 dokumen</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>1. Tahap I terdiri dari 10 Pulau di wilayah Kabupaten Pandeglang yang di laksanakan pada tanggal 6 s/d 8 November 2017; dan,</p> <p>2. Tahap II yang terdiri dari :</p> <p>a. 10 Pulau di Wilayah Kabupaten Pandeglang yang di laksanakan pada tanggal 21 s/d 23 November; dan,</p> <p>b. 2 Pulau di Wilayah Kabupaten Serang yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2017.</p> <p>Hasil pelaksanaan identifikasi pulau diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses lebih lanjut pada Bulan Desember 2017.</p> <p><b>Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b></p> <p>Terlaksananya Rapat Koodinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada tangga 20 Maret 2017 di Hotel Le Dian Hotel &amp; cottages dengan peserta berjumlah 120 Orang yang berasal dari unsur Pemerintahan Kab/Kota khususnya yang menangani kecamatan dan perwakilan Kecamatan-Kecamatan. Hasil yang diperoleh adalah :</p> <p>1. Diperolehnya data terkait pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);</p> <p>2. Diperoleh data permasalahan terkait penyelenggaraan PATEN di Kab/Kota pada tahun 2016;</p> <p>3. Mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Kab/Kota tahun 2016 dalam penyelenggaraan PATEN.</p> <p>-</p> <p>Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan Se Provinsi Banten di selenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2017 di Hotel Ratu Bidakara dengan peserta berjumlah 100 orang dengan hasil yang di capai adalah data hasil Rrekapitulasi Kecamatan yang telak melaksanakan PATEN, dengan rincian sebagai berikut :</p>	<p>70.00</p> <p>100</p> <p>0</p> <p>100</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				1. Kabupaten Pandeglang yang telah melaksanakan PATEN sebanyak 35 Kecamatan dari 35 Kecamatan; 2. Kabupaten Lebak yang telah melaksanakan PATEN sebanyak 28 Kecamatan dari 28 Kecamatan; 3. Kabupaten Tangerang yang telah melaksanakan PATEN sebanyak 7 Kecamatan dan yang belum melaksanakan sebanyak 22 Kecamatan; 4. Kabupaten Serang yang telah melaksanakan PATEN sebanyak 29 Kecamatan dari 29 Kecamatan; 5. Kota Tangerang seluruh Kecamatan belum melaksanakan PATEN, seluruh kecamatan berjumlah 13 Kecamatan; 6. Kota Cilegon yang telah melaksanakan PATEN sebanyak 8 Kecamatan dari 8 Kecamatan; 7. Kota Serang yang telah melaksanakan PATEN sebanyak 6 kecamatan dari 6 kecamatan; 8. Kota Tangerang Selatan seluruh kecamatan belum melaksanakan PATEN, seluruh kecamatan berjumlah 7 Kecamatan.	
		4 Rapat Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebanyak 1 dokumen  <b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b>	100	Terselenggaranya rapat evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Se Provinsi Banten di selenggarakan pada tanggal 26 September 2017 di Hotel Ratu Bidakara dengan peserta berjumlah 100 orang dengan hasil curah pendapat antara lain : 1. Dibutuhkan legalitas terkait SOP dalam penanganan e-KTP untuk Kecamatan; 2. Dibutuhkan peningkatan koordinasi antara pemerintah Kecamatan dengan instansi yang menangani perihal perijinan di Kab/Kota.	100
		1 Rapat Koordinasi Batas Daerah Kabupaten/Kota se-provinsi Banten sebanyak 1 Dokumen	100	<b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b> Terselenggaranya Koordinasi Batas Daerah Kabupaten/Kota se-provinsi Banten yang di laksanakan pada tanggal 20 November 2017 bertempat di Ruang Rapat Gd. SKPD Terpadu Lt.2 KP3B dengan hasil .....	100
		2 Rapat Koordinasi Batas Daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 dokumen	100	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Batas Daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 November 2017 bertempat di Ruang Rapat Gd. SKPD Terpadu Lt.2 KP3B dengan hasil yang di capai antara lain :	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		3 Inventarisasi Pilar Batas Provinsi Banten (Penyerahan Pilar dari BKSP) sebanyak 1 dokumen	100	<p>1. Adanya kesepahaman dan persamaan persepsi terkait Penegasan dan Batas Daerah Antara Provinsi Banten dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat;</p> <p>2. Pendataan Jumlah dan Kondisi Pilar Batas antara Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat;</p> <p>3. Kesepakatan untuk membangun kerjasama dalam hal Penataan dan pemeliharaan Pilar Batas antar Provinsi.</p> <p>Pelaksanaan Inventarisasi dan penyerahan pilar batas Provinsi Banten dengan DKI Jakarta yang di laksanakan pada bulan Februari 2017, dengan hasil antara lain :</p> <p>1. 33 Pilar Batas dengan kondisi Baik;</p> <p>2. 8 Pilar Batas dengan kondisi rusak ringan;</p> <p>3. 4 Pilar Batas dengan kondisi rusak berat;</p> <p>4. 66 Pilar Batas dengan kondisi hilang.</p>	100
		4 Inventarisasi Pilar Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen	100	<p>Pelaksanaan inventarisasi pilar batas Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang di laksanakan pada bulan Maret 2017, dengan hasil antara lain :</p> <p>1. Batas wilayah Kab. Serang dengan Kab. Lebak antara lain :</p> <p>a. 27 bh pilar batas dengan kondisi Baik;</p> <p>b. 9 bh pilar batas dengan kondisi Rusak Ringan;</p> <p>c. 1 bh pilar batas dengan kondisi Rusak Berat; dan,</p> <p>d. 3 bh pilar batas dengan kondisi Hilang.</p> <p>2. Batas wilayah Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan antara lain :</p> <p>a. 14 bh pilar batas dengan kondisi Baik;</p> <p>b. 2 bh pilar batas dengan kondisi Rusak Ringan;</p> <p>c. 2 bh pilar batas dengan kondisi Rusak Berat, dan;</p> <p>d. 5 bh pilar batas dengan kondisi Hilang.</p> <p>3. batas wilayah Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang, antara lain :</p> <p>a. 13 bh pilar batas dengan kondisi Baik; dan,</p> <p>b. 3 bh pilar batas dengan kondisi Hilang.</p> <p>4. Batas wilayah Kab. Pandeglang dengan Kab. Lebak, antara lain :</p> <p>a. 15 bh pilar batas dengan kondisi Baik; dan,</p> <p>b. 14 bh pilar batas dengna kondisi Rusak Ringan;</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				5. Batas wilayah antara Kab. Serang dengan Kota Cilegon, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 26 bh pilar batas dengan kondisi Baik;</li> <li>b. 11 pilar batas dengan kondisi Rusak Ringan, dan:</li> <li>c. 3 pilar batas dengan kondisi Hilang.</li> </ul> 6. Batas wilayah Kab. Serang dengan Kab. Pandeglang, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 16 bh pilar batas dengan kondisi Baik, dan :</li> <li>b. 1 bh pilar batas dengan kondisi Rusak Ringan.</li> </ul> 7. Batas wilayah Kab. Serang dengan kab. Tangerang, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 8 bh pilar batas dengan kondisi Baik, dan;</li> <li>b. 2 bh pilar batas dengan kondisi Hilang.</li> </ul> 8. Batas wilayah antara Kab. Serang dengan Kota Serang, antara lain ; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 51 bh pilar batas dengan kondisi Baik;</li> <li>b. 13 bh pilar batas dengan kondisi Rusak Ringan;</li> <li>c. 1 bh pilar batas dengan kondisi Rusak Berat;</li> <li>d. 5 bh pilar batas dengan kondisi Hilang.</li> </ul> 9. Batas wilayah Kab. Lebak dengan Kab. Tangerang, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 2 bh pilar batas dengan kondisi baik; dan,</li> <li>b. 1 bh pilar batas dengan kondisi Hilang.</li> </ul>	
		<b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah</b>  1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 Dokumen	100  100	<b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah</b>  Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rabu, 17 Mei 2017 di Ruang Rapat Biro pemerintahan Setda Provinsi Banten dengan peserta berjumlah 44 orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten dengan hasil berupa kesepakatan dan informasi terkait persiapan penyusunan LPPD Kab/Kota Se-Provinsi Banten;</li> <li>b. Jumat, 19 Mei 2017 di Hotel Ratu Bidakara, Serang – Banten, dengan peserta berjumlah 44 orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten dengan hasil berupa :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi materi peran dan Fungsi, sistematika penyusunan LPPD dan IKK dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</li> </ul> </li> </ul>	100  100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				2. Pelaksanaan Pra-Evaluasi LPPD dan IKK 8 Kab/Kota (terkait 16 item data kelengkapan dan data dukung LPPD & IKK).	
		3 Penyusunan LPPD Provinsi Banten Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya LPPD Provinsi Banten yang di laksanakan dari tanggal 16 Februari 2017 di Hotel Ratu Bidakara Serang dengan peserta berjumlah 45 Orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten dengan hasil LPPD Provinsi Banten 2016 untuk disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.	100
		4 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya data IKK LPPD Provinsi Banten yang di laksanakan pada tanggal 17 Maret 2017 di Aula Ruang Rapat Setda Provinsi Banten dengan peserta berjumlah 42 Orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten sebagai data utama penyusunan LPPD Provinsi Banten 2016.	100
		5 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) LPPD Kab/Kota sebanyak 8 Dokumen	100	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang di laksanakan pada Tanggal 21 S/D 25 Agustus 2017 Di Hotel Le-Dian Serang Yang Dihadiri Oleh : a. Tim Nasional yang berasal dari Kemendagri berjumlah 9 orang; b. Tim Daerah Provinsi Banten berjumlah 8 orang; c. Tim penyusun LPPD Provinsi Banten berjumlah 6 orang; d. Tim Penyusun LPPD 8 Kab/Kota berjumlah 16 Orang; Hasil rapat koordinasi tersebut adalah : 1. Terevaluasinya LPPD Provinsi dan 8 LPPD dan IKK Kab/Kota; 2. Pemingkatan sementara LPPD 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten, dengan hasil antara lain : Kota Tangerang, Cilegon, Tangerang Selatan, Kab. Tangerang dengan prestasi "Sangat Tinggi", dan untuk Kab. Pandeglang, Lebak, Serang dan Kota Sera ng dengan prestasi "Tinggi".	100
		6 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) LPPD Provinsi Banten sebanyak 1 Dokumen.	100	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang di laksanakan pada Tanggal 21 S/D 25 Agustus 2017 Di Hotel Le-Dian Serang Yang Dihadiri Oleh : e. Tim Nasional yang berasal dari Kemendagri berjumlah 9 orang; f. Tim Daerah Provinsi Banten berjumlah 8 orang; g. Tim penyusun LPPD Provinsi Banten berjumlah 6 orang; h. Tim Penyusun LPPD 8 Kab/Kota berjumlah 16 Orang; Hasil rapat koordinasi tersebut adalah :	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen	100	<p>3. Terevaluasinya LPPD Provinsi dan 8 LPPD dan IKK Kab/Kota;</p> <p>4. Pemingkatan sementara LPPD 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten, dengan hasil antara lain : Kota Tangerang, Cilegon, Tangerang Selatan, Kab. Tangerang dengan prestasi "Sangat Tinggi", dan untuk Kab. Pandeglang, Lebak, Serang dan Kota Serang dengan prestasi "Tinggi".</p> <p>Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten dan 8 Kab/Kota yang dilaksanakan di Aula Biro Pemerintahan dengan peserta berjumlah 16 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota dan 86 orang yang berasal dari SKPD Provinsi Banten dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman terkait sistematika penyusunan LPPD dan IKK tahun 2017 baik pada tingkat Provinsi maupun Kab/Kota;</li> <li>2. Pemahaman pengisian perubahan format IKK untuk IKK tahun 2017 sesuai dengan UU No 23 tahun 2014;</li> <li>3. Penyampaian hasil evaluasi terkait capaian kinerja Provinsi dan 8 Kab/Kota.</li> </ol>	100
		<b>Penataan Daerah Otonom</b>	<b>100</b>	<b>Penataan Daerah Otonom</b>	<b>66.67</b>
		1 Rapat Koordinasi Penyelesaian pelimpahan Aset Pemerintah antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen	100	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelesaian pelimpahan Aset Pemerintah antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota tahun 2017 sebanyak 2 dokumen pada tanggal 18 Mei 2017 di Hotel Mahadria Serang dan pada tanggal 6 September 2017 di Hotel Puri Kayana Serang.	100
		2 Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset antara Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen	100	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset antara Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen pada tanggal 19 April 2017 di Hotel Puri Kayana Serang dengan hasil antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerahan aset Pemerintah Kab. Tangerang kepada Kota Tangerang berjumlah 52 Bidang Aset dengan total nilai Rp. 290.195.300.337,-, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Stadion Persita;</li> <li>b. Eks Kantor Dinas Pertanian;</li> <li>c. Eks Kantor SPHB;</li> <li>d. Eks Kantor Dinas Sosial;</li> <li>e. Eks Kantor Dinas Pendidikan;</li> <li>f. Pasar Pisang;</li> <li>g. Eks Perkantoran Kawasan Cikokol, dll.</li> </ol> </li> <li>2. Penyerahan aset pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Kab. Tangerang, dengan aset total 6 bidang aset tanah dengan luas 58,9 hektar dengan nilai Rp. 87.943.623.000,-</li> </ol>	50

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		3 Rapat Koordinasi Penataan Daerah sebanyak 2 Dokumen	100	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penataan Daerah sebanyak 1 Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017 di Hotel Cilegon City dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang yang berasal dari SKPD Kab/Kota se Provinsi Banten. Hasil rapat koordinasi yang di peroleh antara lain : 1. Harus adanya upaya konkrit dari pemerintah didalam mendorong dan memprediksi perkembangan otonomi daerah di tiap daerahnya; 2. Dalam hal penataan OPD di Kabupaten/Kota, di harapkan berkesesuaian dengan permasalahan yang ada di Kab/Kota, agar penataan yang di laksanakan tepat sasaran.	50
		<b>Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>	<b>100</b>	<b>Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>	<b>442,86</b>
		1 Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 3 kegiatan.	100	Terlaksananya Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 3 kegiatan antara lain : 1. Dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2017 bertempat di Hotel Puri Kayana - Kota Serang dengan peserta berjumlah 50 orang; dengan hasil antara lain : 2. Dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 bertempat di Hotel Puri Kayana - Serang dengan peserta berjumlah 50 Orang; 3. Dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerinthan Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu KP3B Provinsi Banten; Hasil yang di dapatkan dari rapat koordinasi tersebut antara lain : a. Pemerintahan daerah berkoordinasi dengan instansi yang terkait guna memfasilitasi proses penyiapan data administrasi Anggota DPRD Provinsi Banten, Kabupaten/Kota terutama terkait PAW (Pergantian Antar Waktu); b. Memberikan perhatian terhadap pentingnya aspek sosialisasi kepada pelaksana fasilitasi administrasi bagi kepala daerah dan DPRD; c. Dalam pelaksanaan fasilitasi administrasi bagi kepala daerah dan DPRD sebagai anggota PNS harus bersikap netral dan memberikan pelayanan tanpa diskriminatif atau berpihak kepada kepala daerah/partai politik tertentu.	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW sebanyak 1 kegiatan	100	<p>Tersusunnya dokumen pengesahan pensiun pejabat negara sebanyak 1 kegiatan dengan perincian antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberhentian Rudi Kurniawan dari fraksi PDIP sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak;</li> <li>2. Pemberhentian Jubaidi AF dari Fraksi PDIP sebagai DPRD Kabupaten Serang;</li> <li>3. Pemberhentian Namin SH dari Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang;</li> <li>4. Pemberhentian Agus Sutisna dari Fraksi PDIP sebagai DPRD Kota Serang;</li> <li>5. Pemberhentian Dedi Ramanta dari Fraksi Nasdem sebagai DPRD Provinsi Banten;</li> <li>6. Pemberhentian Firma Maju Sinaga dari Fraksi PDIP sebagai DPRD Kabupaten Tangerang;</li> <li>7. Pemberhentian Pontjo Prayogo dari fraksi Golkar sebagai anggota DPRD Kota Tangerang;</li> <li>8. Pemberhentian Taufik MM SE dari fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;</li> <li>9. Pemberhentian DR. Chinta Charuddin dari fraksi PKS sebagai DPRD Tangerang Selatan.</li> </ol>	100
		3 Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebanyak 1 kegiatan	100	<p>Tersusunnya dokumen ijin keluar negeri alasan penting bagi Pejabat Negara sebanyak 1 dokumen dengan pengajuan cuti antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak jabatan sebagai Bupati Serang mengajukan cuti pada tanggal 10 Januari 2017 untuk melaksanakan ibadah Umroh ke Arab Saudi dari tanggal 11 s.d 20 Januari 2017;</li> <li>2. Hj. Irna Narulita, SE, MM jabatan sebagai Bupati Pandeglang mengajukan cuti untuk melaksanakan ibadah Umroh ke Arab Saudi pada tanggal 2 s.d 11 Maret 2017;</li> <li>3. Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM jabatan sebagai Bupati Lebak mengajukan cuti pada tanggal 28 Februari 2017 untuk melaksanakan ibadah Umroh ke Arab Saudi pada tanggal 11 s.d 22 Maret 2017;</li> <li>4. H. Arief R. Wismansyah jabatan sebagai Walikota Tangerang, mengajukan permohonan cuti pada tanggal 20 April 2017 untuk melaksanakan ibadah umroh ke Arab Saudi pada tanggal 20 s.d 23 April 2017;</li> </ol>	100



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>5. H. Nana Sumarna sabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon pada tanggal 25 Juli 2017 mengajukan cuti untuk melaksanakan ibadah umroh ke Arab Sudi pada tanggal 10 s.d 18 September 2017;</p> <p>6. Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM jabatan sebagai Bupati Lebak mengajukan cuti pada tanggal 29 Agustus 2017 mengajukan cuti untuk melakukan pemeriksaan dan observasi sebagai kelanjutan pengobatan ke Dr. Med. Robert Janson Muller Unter dem ke Jerman selama 16 (enam belas) hari terhitung mulai tanggal 5 s.d 20 september 2017 dengan melampirkan surat rekomendasi dokter;</p> <p>7. Tb. Khaerul Jaman jabatan sebagai Walikota Serang, mengajukan cuti ke Jepang kepentingan keluarga, dan ke Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Umroh;</p>	
		4 Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah sebanyak 1 dokumen	100	<p>Tersusunnya dokumen ijin keluar negeri alasan penting bagi Pejabat Negara sebanyak 1 dokumen dengan pengajuan cuti antara lain :</p> <p>1. Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak jabatan sebagai Bupati Serang mengajukan cuti pada tanggal 10 Januari 2017 untuk melaksanakan ibadah Umroh ke Arab Saudi dari tanggal 11 s.d 20 Januari 2017;</p> <p>2. Hj. Irna Narulita, SE, MM jabatan sebagai Bupati Pandeglang mengajukan cuti untuk melaksanakan ibadah Umroh ke Arab Saudi pada tanggal 2 s.d 11 Maret 2017;</p> <p>3. Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM jabatan sebagai Bupati Lebak mengajukan cuti pada tanggal 28 Februari 2017 untuk melaksanakan ibadah Umroh ke Arab Saudi pada tanggal 11 s.d 22 Maret 2017;</p> <p>4. H. Arief R. Wismansyah jabatan sebagai Walikota Tangerang, mengajukan permohonan cuti pada tanggal 20 April 2017 untuk melaksanakan ibadah umroh ke Arab Saudi pada tanggal 20 s.d 23 April 2017;</p> <p>5. H. Nana Sumarna sabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon pada tanggal 25 Juli 2017 mengajukan cuti untuk melaksanakan ibadah umroh ke Arab Sudi pada tanggal 10 s.d 18 September 2017;</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>6. Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM jabatan sebagai Bupati Lebak mengajukan cuti pada tanggal 29 Agustus 2017 mengajukan cuti untuk melakukan pemeriksaan dan observasi sebagai kelanjutan pengobatan ke Dr. Med. Robert Janson Muller Unter dem ke Jerman selama 16 (enam belas) hari terhitung mulai tanggal 5 s.d 20 september 2017 dengan melampirkan surat rekomendasi dokter;</p> <p>7. Tb. Khaerul Jaman jabatan sebagai Walikota Serang, mengajukan cuti ke Jepang kepentingan keluarga, dan ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah Umroh;</p>	
		<p>5 Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota sebanyak 1 kegiatan</p> <p>6 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah sebanyak 1 kegiatan</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>Terusunnya Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten/Kota sebanyak 1 kegiatan yang berisi sambutan perayaan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.</p> <p>Terlaksananya Rapat Koordinasi Pimpinan daerah sebanyak 1 dokumen dengan kegiatan rapat yang di laksanakan pada Kamis 14Desember 2017 bertempat di Pendopo Gubernur Banten. Kegiatan rapat koordinasi di hadiri oleh seluruh Muspida dan Pihak Swasta di Lingkungan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15 undangan yang berasal dari Forkopimda Provinsi Banten;</li> <li>Bupati dan Walikota se Provinsi Banten;</li> <li>Pimpinan OPD Provinsi Banten;</li> <li>11 instansi vertikal;</li> <li>Kapolres Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten;</li> <li>11 Organisasi Masyarakat di Provinsi Banten;</li> <li>35 BUMN se-Provinsi Banten.</li> </ol> <p>Hasil Rakor antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terkait persiapan pengamanan Natal, Tahun Baru 2018 dan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;</li> <li>Kesiapan sarana dan prasarana transportasi, baik darat, laut maupun udara;</li> <li>Kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018;</li> <li>Kesiapan sarana dan prasarana kesehatan menghadapi Natal, Tahun Baru 2018 dan Pilkada Serentak 2018.</li> </ol>	<p>100</p> <p>100</p>
		<p>7 Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 1 dokumen</p>	<p>100</p>	<p>Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan satu hari pada tanggal 19 April 2017 bertempat di Hotel Ledian – Serang dan pada tanggal</p>	<p>100</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>22 Agustus 2017 bertempat di Hotel Puri Kayana – Kota Serang. peserta yang hadir berjumlah 50 orang yang berasal dari OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Hasil yang di peroleh dari Rakor tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintahan daerah berkoordinasi dengan instansi yang terkait guna memfasilitasi proses penyiapan data administrasi Anggota DPRD Provinsi Banten, Kabupaten/Kota terutama terkait PAW (Pergantian Antar Waktu);</li> <li>2. Memberikan perhatian terhadap pentingnya aspek sosialisasi kepada pelaksana fasilitasi administrasi bagi kepala daerah dan DPRD;</li> <li>3. Dalam pelaksanaan fasilitasi administrasi bagi kepala daerah dan DPRD sebagai anggota PNS harus bersikap netral dan memberikan pelayanan tanpa diskriminatif atau berpihak kepada kepala daerah/partai politik tertentu.</li> </ol>	
		8 Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah sebanyak 1 kegiatan	100	<p>Tersusunnya dokumen pengesahan pensiun pejabat negara sebanyak 1 kegiatan dengan perincian antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberhentian Rudi Kurniawan dari fraksi PDIP sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak;</li> <li>2. Pemberhentian Jubaidi AF dari Fraksi PDIP sebagai DPRD Kabupaten Serang;</li> <li>3. Pemberhentian Namin SH dari Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang;</li> <li>4. Pemberhentian Agus Sutisna dari Fraksi PDIP sebagai DPRD Kota Serang;</li> <li>5. Pemberhentian Dedi Ramanta dari Fraksi Nasdem sebagai DPRD Provinsi Banten;</li> <li>6. Pemberhentian Firma Maju Sinaga dari Fraksi PDIP sebagai DPRD Kabupaten Tangerang;</li> <li>7. Pemberhentian Pontjo Prayogo dari fraksi Golkar sebagai anggota DPRD Kota Tangerang;</li> <li>8. Pemberhentian Taufik MM SE dari fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;</li> <li>9. Pemberhentian DR. Chinta Charuddin dari fraksi PKS sebagai DPRD Tangerang Selatan.</li> </ol>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		100		100
		Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan	100	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan	100
		1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 2 dokumen	100	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di laksanakan melalui 2 Rapat Koordinasi antara lain : 1. Dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan data dan informasi pada tanggal 22 Agustus 2017 bertempat di Hotel Wisata Baru serang. 2. Dilaksanakan rapat penyusunan data dan informasi pembangunan daerah pada tanggal 21 November 2017 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. 3. Pelaksanaan Publikasi melalui media masa dilaksanakan dalam kurun waktu Januari s/d Desember yang di laksanakan antara lain : a. Media Berkala, publikasi dilaksanakan melalui 14 kali pelaksanaan publikasi; b. Melalui media Online, publikasi dilaksanakan dengan 15 kali pelaksanaan publikasi; c. Melalui media harian, publikasi di laksanakan dengan 8 kali pelaksanaan publikasi	100

## 2. Rencana dan Realisasi Outcome

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan fokus kepada hasil yang dicapai sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pengukuran kinerja outcome pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 84.04 % dari target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :

### A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama daerah dan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri mencapai kinerja 66.67 %;

2. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui pelaksanaan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Program peningkatan Sarana, Prasarana dan Jasa Perkantoran Pada Biro Pemerintahan meliputi Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Administrasi rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Penataan Daerah Otonom, Penataan Wilayah Administrasi dan Batas daerah, Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga, Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro serta Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja 98.61%;
  3. Urusan Wajib Statistik melalui pelaksanaan Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja 100%
- B. Per Program
1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja 100%
  2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Jasa Perkantoran pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja 100%
  3. Program Kerjasama Pembangunan Daerah mencapai kinerja 83.33%
  4. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum mencapai kinerja 95.83%
  5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah mencapai kinerja 100%

Rincian realisasi kinerja outcome sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Rencana dan Realisasi Outcome

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Laporan Keuangan dan SPIP	100	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Laporan Keuangan dan SPIP	100
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi Dalam Penyelenggaraan Tugas Umum di Bidang Pemerintahan sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan :	100	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi Dalam Penyelenggaraan Tugas Umum di Bidang Pemerintahan sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan :	100

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan Kinerja;</li> <li>2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan;</li> <li>3. Penyusunan Bahan RENSTRA Tahun 2017 – 2021;</li> <li>4. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan Kinerja;</li> <li>2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan;</li> <li>3. Penyusunan Bahan RENSTRA Tahun 2017 – 2021;</li> <li>4. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja</li> </ol>	
<b>KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>100</b>		<b>83.33</b>
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Meningkatnya Kerjasama Daerah Dalam Pembangunan sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Kerja Daerah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama;</li> <li>2. Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia;</li> <li>3. Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah;</li> </ol>	100	Meningkatnya Kerjasama Daerah Dalam Pembangunan sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Kerja Daerah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama;</li> <li>2. Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia;</li> <li>3. Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah;</li> </ol>	100
Penyelenggaraan Keerjasama Luar Negeri	Meningkatnya Kerjasama Luar Negeri Daerah Dalam Pembangunan sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri;</li> <li>2. Rapat Koordinasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga;</li> <li>3. Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri.</li> </ol>	100	Meningkatnya Kerjasama Luar Negeri Daerah Dalam Pembangunan sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri;</li> <li>2. -</li> <li>3. Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri.</li> </ol>	66.67
<b>PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN JASA PADA BIRO PEMERINTAHAN</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro Pemerintahan	Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan jasa Administrasi Perkantoran Serta pelayanan Tata usaha sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS);</li> <li>2. Penyediaan Makan dan Minum Kantor;</li> <li>3. Penyediaan barang Pakai Habis (ATK);</li> <li>4. Penyediaan Bahan Cetak dan penggandaan;</li> <li>5. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet;</li> <li>6. Promosi dan Publikasi;</li> </ol>	100	Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan jasa Administrasi Perkantoran Serta pelayanan Tata usaha sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS);</li> <li>2. Penyediaan Makan dan Minum Kantor;</li> <li>3. Penyediaan barang Pakai Habis (ATK);</li> <li>4. Penyediaan Bahan Cetak dan penggandaan;</li> <li>5. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet;</li> <li>6. Promosi dan Publikasi;</li> </ol>	100
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Biro Pemerintahan	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Tugas Kedinasan Lainnya sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;</li> <li>2. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</li> </ol>	100	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Tugas Kedinasan Lainnya sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;</li> <li>2. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</li> </ol>	100
<b>PEMBINAAN, PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>100</b>		<b>95.83</b>
Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Rasio Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi dan Pemerintahan Umum sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten;</li> </ol>	100	Meningkatnya Rasio Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi dan Pemerintahan Umum sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten;</li> </ol>	100

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; 3. Identifikasi Dalam Rangka Validasi Temuan Pulau Baru di Provinsi Banten.		2. Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; 3. Identifikasi Dalam Rangka Validasi Temuan Pulau Baru di Provinsi Banten.	
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya Rasio Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 3. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 4. Rapat Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Terpadu Kecamatan (PATEN).	100	Meningkatnya Rasio Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 2. - 3. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 4. Rapat Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Terpadu Kecamatan (PATEN)	75.00
Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	Meningkatnya Koordinasi Penyelesaian Batas daerah di Provinsi Banten dan Dengan Provinsi Perbatasan sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Batas Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten; 2. Rapat Koordinasi Batas Daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat; 3. Inventarisasi Pilar batas Provinsi banten (Penyerahan Pilar Dari BKSP); 4. Inventarisasi Pilar Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.	100	Meningkatnya Koordinasi Penyelesaian Batas daerah di Provinsi Banten dan Dengan Provinsi Perbatasan sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Batas Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten; 2. Rapat Koordinasi Batas Daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat; 3. Inventarisasi Pilar batas Provinsi banten (Penyerahan Pilar Dari BKSP); 4. Inventarisasi Pilar Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.	100
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Penyusunan LPPD Provinsi Banten; 3. Penyusunan IKK Provinsi Banten; 4. Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan (EKPPD) LPPD Provinsi Banten; 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Kabupaten/Kota.	100	Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Penyusunan LPPD Provinsi Banten; 3. Penyusunan IKK Provinsi Banten; 4. Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan (EKPPD) LPPD Provinsi Banten; 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Kabupaten/Kota.	100

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penataan Daerah Otonom	Terselenggaranya Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Yang Akuntabel sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelimpahan Aset Pemerintah antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/kota; 2. Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset antara Kabupaten/Kota; 3. Rapat Koordinasi Penataan Daerah.	100	Terselenggaranya Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Yang Akuntabel sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelimpahan Aset Pemerintah antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/kota; 2. Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset antara Kabupaten/Kota; 3. Rapat Koordinasi Penataan Daerah.	100
Administrasi Pimpinan Daerah dan hubungan Antar Lembaga	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW; 3. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD; 4. Pemberian Ujin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah; 5. Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota; 6. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah; 7. Eapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 8. Pengesahan Pensiun Pejabat Negara;	100	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW; 3. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD; 4. Pemberian Ujin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah; 5. Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota; 6. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah; 7. Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 8. Pengesahan Pensiun Pejabat Negara;	100
<b>PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.	100	Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebesar 100% tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.	100

### 3. Rencana dan Realisasi Capaian Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau Unit SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan mempedomani kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang diimplementasikan kedalam perencanaan tahunan (RENJA) yang diuraikan dalam kegiatan dan anggaran. Kesesuaian antara kegiatan dan anggaran tahunan dengan program yang dilaksanakan berpengaruh terhadap capaian kinerja program jangka menengah yang telah ditetapkan.



Pengukuran kinerja capaian program pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 94.98% dari target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Rapat Kerjasama Daerah dan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri mencapai kinerja 83.33%;
2. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui pelaksanaan Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Jasa Perkantoran pada Biro Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah meliputi Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Penataan Daerah Otonom, Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah, Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga, Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Biro pemerintahan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Biro Pemerintahan serta Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro mencapai kinerja 98.61%;
3. Urusan Wajib Statistik melalui pelaksanaan Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja 100%

B. Per Program

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja 100%;
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Jasa Perkantoran pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja 100%
3. Program Kerjasama Pembangunan Daerah mencapai kinerja 83.33%
4. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum mencapai kinerja 95.83%
5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah mencapai kinerja 100%

Rincian realisasi kinerja outcome sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Rencana dan Realisasi Capaian Program

PROGRAM	RENCANA		REALISASI	
	TARGET CAPAIAN PROGRAM	%	TARGET CAPAIAN PROGRAM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah	100	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah	100

PROGRAM	RENCANA		REALISASI	
	TARGET CAPAIAN PROGRAM	%	TARGET CAPAIAN PROGRAM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan		2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan	
Kerjasama Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kerjasama Daerah dalam Pembangunan melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	100	Koordinasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	83.33
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum	Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 3. Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi pemerintahan; 4. Penataan Daerah Otonom; 5. Penataan Wilayah Administrasi dan batas Daerah, dan; 6. Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.	100	Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 3. Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi pemerintahan; 4. Penataan Daerah Otonom; 5. Penataan Wilayah Administrasi dan batas Daerah, dan; 6. Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.	95.83
Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan	100	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan	100

**C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

**1) PERMASALAHAN**

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan yang mengganggu jalannya kinerja pada tahun 2017. Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2017, diantaranya :

1. Penyerapan anggaran baru dapat di dilaksanakan pada bulan Maret 2017;
2. Terjadinya pergantian pimpinan (Kepala Biro Pemerintahan) di sebabkan telah berakhirnya masa tugas Kepala Biro Pemerintahan pada akhir bulan Mei 2017. Pengangkatan Plt (Pelaksana Teknis) Kepala Biro Pemerintahan baru di lantik per 1 September 2017. Secara umum Biro Pemerintahan hanya dapat melaksanakan Program dan Kegiatan serta penyerapan anggarannya selama 7 Bulan; Kedua hal tersebut yang mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di buat sebelumnya.

## 2) SOLUSI

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan;
4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);
5. Terkait dengan pensiun ASN seharusnya sudah dapat di prediksi jauh hari sebelumnya, dengan melihat data masa kerja dalam identitas ASN. Kemudian terkait dengan pengangkatan Plt (pelaksana teknis) seharusnya juga sudah dapat di verifikasi jauh hari sebelum pensiun seorang ASN. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan kembali, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dengan pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Mempedomani hal tersebut, pada tahun 2017 pada Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Banten terdapat Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui Dekonsentrasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI Unit Organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai berikut :

#### a. Program Bina Administrasi Kewilayahan

##### A. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang – Undang No 18 Tahun 2016 tentang APBN TA. 2017;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-163 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Tahun 2016;
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2017 Nomor SP-DIPA-010.04.3.299348/2017;

##### B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI.

##### C. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

###### 1) Program, Kegiatan dan Output

1. Program Bina Administrasi Kewilayahan
2. Kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah;
  - b. Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah dan Toponimi.
3. Output :
  - a. Layanan pembinaan hubungan Pusat dan Daerah serta kerjasama daerah;
  - b. Layanan penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah dan toponimi.

4. Hasil (Outcome) :
  - a. Meningkatnya konsolidasi kebijakan standarisasi teknis bidang administrasi kewilayahan;
  - b. Meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
5. Aktivitas : Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah.

## 2) Pelaksanaan Program Kegiatan

### a. Rencana dan Realisasi Input

Realisasi Kinerja Input Pelaksanaan Program Bina Administrasi Kewilayahan di Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 241.513.907,- atau mencapai 56.29% dari pagu sebesar Rp. 429.052.000 dengan rincian sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 5.1  
Rencana dan Realisasi Kinerja Input  
Tugas Pembantuan Tahun 2017

NO	OUTPUT	AKTIVITAS	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Layanan Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di Daerah	229.052.000,-	125.340.000,-	54.72
2	Layanan Penataan Wilayah Administrasi, penegasan batas Daerah dan Toponimi	Pebakuan nama rupabumi dan updating data wilayah	200.000.000,-	116.173.907,-	58.09
<b>Jumlah</b>			<b>429.052.000,-</b>	<b>241.513.907</b>	<b>56.29</b>

### b. Rencana dan Realisasi Output

Realisasi Kinerja Output Pelaksanaan Program Bina Administrasi Kewilayahan di Provinsi Banten hanya terealisasi sebesar 100% dengan rincian sebagaimana Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2  
Rencana dan Realisasi Kinerja Output  
Tugas Pembantuan Tahun 2017

NO	RENCANA		REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Layanan pembinaan hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	100	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Kegiatan ini di dukung dengan rapat Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 14 s/d 16 November 2017 yang di laksanakan di hotel Aryaduta Lippo Vilage. Kegiatan di hadiri oleh 54 peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.	100

NO	RENCANA		REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Hasil yang di peroleh dari kegiatan rapat antara lain : 1. Pemahaman sistem proses koordinasi dan konsultasi antara Pusat dengan Provinsi dan juga dengan Kabupaten/Kota;  2. Pemahaman sistematika pembentukan kerjasama di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota; 3. Pemahaman sistematika pembangunan kerjasama dengan 4. pihak ketiga baik di Pusat maupun di Daerah	
2	Layanan penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah dan toponimi	100	Terlaksananya pembakuan nama rupabumi dan updating data wilayah. Hal ini di dukung dengan rapat koordinasi pembakuan rupabumi unsur buatan dan warisan budaya. Peserta rapat koordinasi berjumlah 54 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi Banten yang khususnya menangani terkait rupabumi dan toponimi. Hasil yang diperoleh dari rakor tersebut adalah : 1. Penyempurnaan pembakuan rupabumi unsur buatan yang di sampaikan oleh Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten; 2. Penyempurnaan kode data wilayah se -Provinsi Banten yang berasal dari Kabupaten/Kota.	100

### 3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

1. Jumlah Pegawai  
3 (tiga) orang pada Bagian Administrasi Kewilayahan dan 5 (lima) orang dari Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Kualifikasi pendidikan  
1 (satu) orang Pasca Sarjana Ilmu Administrasi;  
1 (satu) orang Pasca Sarjana Administrasi Pemerintah Daerah;  
1 (satu) orang Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan;  
1 (satu) orang Pasca Sarjana Administrasi Negara;  
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan;  
2 (dua) orang Sarjana Ilmu Administrasi Negara;  
1 (satu) orang Diploma IV Ilmu Pemerintahan.
3. Pangkat dan golongan  
2 (dua) orang Pembina Tk. I (IV/b)  
1 (satu) orang Pembina (IV/a)  
2 (dua) orang Penata Tk. I (III/d)  
1 (satu) orang Penata (III/c)  
2 (dua) orang Penata Muda Tk. I (III/b)

### 4) Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan Pencapaian Kinerja  
Terjadinya keterlambatan penerimaan DIPA ke Pemprov Banten serta Juklak Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang baru di terima pada bulan November 2017;

2. Solusi

Diperlukan penjadwalan dan penyampaian DIPA yang tepat waktu dan penjadwalan yang sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah di tetapkan sehingga realisasi kinerja input dan output dapat lebih meningkat.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN

### TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

#### A. Kerjasama Antar Daerah

- a. Nota Kesepahaman
  1. Daerah Yang Diajak Kerjasama  
Pemerintah Daerah Kota Bandung
  2. Dasar Hukum  
100/MoU.15-Huk/2017 dan 119/3479-Bag.KS tanggal 1 November 2017
  3. Yang Menandatangani
    1. DR. H. Wahidin Halim, M. Si (Gubernur Provinsi Banten)
    2. Mochamad Ridwan Kamil, ST., M.Ud (Walikota Bandung)
  4. Bidang Kerjasama  
Kerjasama pengembangan Smart City dan E-Government

#### B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (RAKORPIMDA) dalam rangka kesiapan menjelang Hari Natal dan Tahun baru 2018 yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Banten KP3B- Kota Serang.
  - 1) Materi Koordinasi
    - a) Pengamanan Natal, Tahun Baru 2018 dan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang di sampaikan oleh Polda Metro Jaya dan Polda Banten;
    - b) Kesiapan Angkatan Darat, laut dan Udara serta kesiapan Pengaturan Lalu Lintas yang di sampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
    - c) Ketersediaan dan Distribusi Kebutuhan pokok Masyarakat yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
    - d) Pemaparan materi terkait Kesiapan dan Kondisi Jalan Raya yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
    - e) Ketersediaan layanan posko kesehatan dan tenaga medis yang di sampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
    - f) Ketersediaan Bahan bakar Minyak dan Gas yang di sampaikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
    - g) Kesiapan dan Informasi Tempat Wisata yang di sampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
    - h) Informasi daerah rawan bencana dan kesiapan penanggulangannya yang di sampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
    - i) Kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang di sampaikan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Banten, KPU Provinsi Banten dan Bawaslu Provinsi Banten;
    - j) Kesiapan pengawasan Obat dan Makanan yang disampaikan oleh Balai POM Provinsi Banten;
    - k) Kesiapan terkait *Up-Date* informasi Prakiraan Cuaca yang di sampaikan oleh Kantor BMKG;
    - l) Kesiapan ketersediaan Listrik yang di sampaikan oleh PLN APJ Banten.



## 2) Instansi Vertikal Yang Terlibat

- 1) Polda Banten;
- 2) Polda Metro Jaya;
- 3) Korem 064/Maulana Yusuf;
- 4) Korem 052/Wijaya Krama;
- 5) KPU Provinsi Banten;
- 6) Lanal Banten;
- 7) Group I Kopassus Serang;
- 8) Lanud Gorda;
- 9) Kanwil Kemenag Provinsi Banten;
- 10) Kepala BIN Daerah Provinsi Banten;
- 11) BPK RI Perwakilan Provinsi Banten;
- 12) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;
- 13) Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Banten;
- 14) BPN Provinsi Banten;
- 15) Kanwil Ditjen Perpajakan Provinsi banten
- 16) Kanwil Perbendaharaan Negara Provinsi Banten;
- 17) BNN Provinsi Banten;
- 18) Komisi Informasi Provinsi Banten;
- 19) BPS Provinsi Banten;
- 20) BKKBN Provinsi Banten;
- 21) Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten;
- 22) BUMN/BUMD/Swasta, antara lain :
  - a. PT. Banten Global Development;
  - b. PT. Jamkrida Banten;
  - c. Syahbandar Pelabuhan Merak-Banten;
  - d. Administrator Bandara Soekarno-Hatta;
  - e. Bank Indonesia Perwakilan banten;
  - f. PT. PLN Serang;
  - g. PT. Pertamina Unit Gerem;
  - h. PT. Marga Mandala Sakti;
  - i. PT. Jasa Marga Tangerang;
  - j. PT. ASDP Merak;
  - k. PT. Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta;
  - l. PT. Jasa Raharja Serang;
  - m. DAOPS I PT. Kereta Api Indonesia;
  - n. PT. Pelindo II Cabang Banten;
  - o. PT. Telkom Indonesia Wilayah Banten;
  - p. Divreg Bulog DKI – Banten;
  - q. Balai POM Provinsi Banten;
  - r. Balai Besar Jalan Nasinal IV Kementerian PU;
  - s. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Serang;
  - t. PT. Krakatau Steel;
  - u. PT. Nikomas;
  - v. PT. Parkland;
  - w. PT. Parkland I;
  - x. PT. Parkland II;
  - y. PT. Indah Kiat Pulp and Papper Tangerang;

- z. PT. POSCO Cilegon;
  - â. PT. Asahimas;
  - ä. PT. Candra Asri Cilegon;
  - ö. PT. PEMI;
  - aa. ORGANDA Provinsi Banten;
  - bb. PHRI Provinsi Banten;
  - cc. Kwarda Pramuka Provinsi Banten;
  - dd. RRI Provinsi Banten;
  - ee. ORARI Provinsi Banten.
- 3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
- a) Jumlah Pegawai :  
4 (empat) orang pada Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  - b) Kualifikasi Pendidikan :  
1 (satu) orang Diploma IV Ilmu Pemerintahan  
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan;  
1 (satu) orang Sarjana Administrasi Negara;  
1 (satu) orang SLTA;
  - c) Pangkat dan Golongan  
2 (dua) orang Penata Tingkat I (III/d)  
1 (satu) orang Penata Muda Tingkat I (III/b)  
1 (satu) orang Pengatur Muda (II/a)
- 4) Hasil dan Manfaat Koordinasi
- Langkah-langkah dalam Rangka Kesiapan, Pengamanan dan Ketersediaan Stok Harga Bahan Pokok dalam menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru 2018 serta Pilkada Serentak 2018.
- Secara garis besar Provinsi Banten sera 8 Kabupaten/Kota telah siap dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2018 baik dalam segi Keamanan, Ketersediaan BBM dan Gas, ketersediaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako), Pariwisata dalam Menghadapi liburan serta kesiapan Infrastruktur.

### C. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Kabupaten/Kota  
Tidak terdapat sengketa batas wilayah Kab/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2017.
2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
  - a) Jumlah Pegawai :  
3 (empat) orang pada Sub Bagian Bina Wilayah
  - b) Kualifikasi Pendidikan :  
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan;  
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Administrasi Negara;  
1 (satu) orang SLTA.
  - c) Pangkat dan Golongan  
1 (satu) orang Penata Tingkat I (III/d)  
1 (dua) orang Penata Muda (III/a)  
1 (satu) orang Pengatur Muda (II/a)

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten akhir tahun anggaran 2017 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten difokuskan kepada upaya pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017.

**Serang, 9 Januari 2018**

**Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**Drs. H. NANANG IRAWAN. M.Si**

PEMBINA Tk. I

NIP. 19740211 199402 1 002